PEDOMAN UMUM

PENYUSUNAN LAPORAN DAN KUMPULAN DATA

STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA TAHUN 2007

Asisten Deputi Urusan Data dan Informasi Lingkungan

Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas

Kementerian Negara Lingkungan Hidup

2007

PEDOMAN UMUM

PENYUSUNAN LAPORAN DAN KUMPULAN DATA

STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA TAHUN 2007

Pengarah:
Isa Karmisa Ardiputra,
Deputi Menteri Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas

Koordinator:
Siti Aini Hanum, Wijono Pribadi, Imam Samudra, Maulyani Djajadilaga,

Tim Penyusun:
Sri Murwani Nurfadilastuti, Heru Harnowo, Aksa Tejalaksana, Hari Wibowo,
Luhut Lumban Gaol, Yayat Rukhiyat, Indira Siregar, Hasan Nurdin, Agnes Swastikarina,
Abdul Aziz Sitepu, Suharyono Drajat, Adi Fajar R.

Sekretariat:
Suhartono, Wiyoga, Heru Subroto, Sishatantri Dombot, Sudarmanto

Narasumber:
Tience Darmiati (Widyaiswara-KNLH), Heddy S. Mukna (KNLH)

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan perlu didukung data dan informasi lingkungan hidup yang berkesinambungan, terukur, akurat dan transparan.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan dan mewujudkan akuntabilitas publik, pemerintah berkewajiban menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Informasi tersebut harus menggambarkan keadaan lingkungan hidup, baik penyebab dan dampak permasalahannya, maupun respon pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup. Untuk itu pelaporan lingkungan menjadi sangat penting sebagai sarana untuk memantau kualitas dan alat untuk menjamin perlindungan kehidupan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah merupakan sarana yang penting mengkomunikasikan informasi mengenai lingkungan hidup dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan serta membantu pengambil keputusan menentukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan.

Pedoman ini disusun untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pembuatan laporan dan pengumpulan data lingkungan, dengan kerangka penulisan dan analisis yang mudah dipahami.

Jakarta, November 2006

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	Iii
Daftar Isi	Iv
1. Latar Belakang	1
A. Laporan SLHD Provinsi	3
B. Laporan SLHD Kabupaten/Kota	3
C. Jenis Laporan	3
2. Ruang Lingkup	4
A. Data Utama	4
B. Tahun Data	4
3. Proses Penyusunan SLHD	
A. Pembentukan Tim Penyusun	4
B. Metodologi Penyusunan Kumpulan Data SLHD	4
C. Metodologi Penyusunan Laporan SLHD	4
4. Sistematika Penulisan Laporan	
A. Laporan SLHD	5
B. Kumpulan Data SLHD	6
5. Format Pelaporan	
A. Bentuk Fisik Laporan	6
B. Penyampaian Tabel	7
C. Penyampaian Gambar	7
D. Penyampaian Daftar Pustaka	7
6. Waktu Pelaksanaan Penyusunan	
A. Pengumpulan dan Penyerahan Kumpulan Data	8
B. Penyusunan dan Publikasi Laporan	8
7. Penyerahan Laporan	
A. Kelengkapan Penyerahan Laporan	8
B. Alamat penyerahan Laporan	9
Daftar Pustaka	9
Lampiran	10
A. Model State – Pressure – Response (S–P–R)	L- i
B. Kriteria Isu Lingkungan Hidup Utama	L- ii
C. Contoh Cover	L-iii
D. Contoh Tabel	L- v
E. Contoh Gambar	L- vi

1. PENDAHULUAN

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (*the United Nations Conference on Environment and Development–UNCED*) di Rio de Janeiro, tahun 1992, telah menghasilkan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan ke dalam Agenda 21.

Dalam Agenda 21 Bab 40, disebutkan perlunya Pemerintahan baik Daerah maupun Nasional untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi multisektoral pada proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Sehingga Informasi Bagi Pengambil Keputusan merupakan isu lintas sektor yang utama. Hal tersebut menuntut ketersediaan data, keakuratan analisis, serta penyajian informasi lingkungan hidup yang informatif.

Hal ini sejalan dengan pasal 10 huruf h, Undang-undang 23 Tahun 1997, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan pemerintah baik Nasional maupun Daerah menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat.

Selain itu Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah melimpahkan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Dengan meningkatnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good environmental governance*) diharapkan akan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarian lingkungan hidup.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan negara-negara Asia Pasifik dan amanat undang-undang tersebut, sejak tahun 2002 pada tingkat nasional telah diterbitkan laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) setiap tahun. Sementara untuk pemerintah daerah sejak tahun 1982 telah dikembangkan Neraca Lingkungan Hidup (NLH), kemudian pada tahun 1986 menjadi Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD), dan mulai tahun 1994 menjadi Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (NKLD).

Sejak tahun 2001 secara bertahap laporan NKLD diintegrasikan kedalam penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan mulai menggunakan format State–Pressure-Respons (S-P-R) dalam penyusunannya. Pada tahun 2002 telah ditindaklanjuti dengan surat Menteri Negara Lingkungan Hidup kepada Daerah untuk menyusun laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dengan mengacu kepada Pedoman Umum Penyusunan Laporan SLHD yang dikeluarkan oleh KNLH.

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah bertujuan :

1. Menyediakan data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah;
2. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.
3. Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), Program Pembangunan Daerah (Propeda), dan kepentingan penanaman modal (investor).
4. Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (*Good Environmental Governance*) di daerah; serta sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan bersama-sama dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Salah satu ciri pokok dalam penyusunan laporan SLHD terletak pada kemampuan menganalisis secara komprehensif hubungan aspek lingkungan fisik (gejala biofisika) dengan aspek sosial-ekonomi kedalam bahasa yang dapat dipahami masyarakat umum/awam. Keberhasilan pemanfaatan laporan SLHD terletak pada meningkatnya pengertian dan kesadaran berbagai lapisan masyarakat dalam turut mengatur, menjaga, dan melindungi kelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan berkelanjutan tidak akan terlaksana tanpa memasukan unsur konservasi dan pelestarian lingkungan hidup ke dalam kerangka proses pembangunan. Hal tersebut dicapai dengan memperhatikan keterkaitan antara ekosistem lingkungan dan manusia serta sebab akibatnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Negara-negara Asia-Pasifik (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - ESCAP) tahun 1995 menyepakati penggunaan metoda S-P-R (*State-Pressure-Response*) dari UNEP (United Nation Environment Program) untuk penyusunan *State of the Environment Report (SoER)* setiap negara untuk mengetahui status lingkungan hidup secara global. (Lampiran A).

Seperti dalam penyusunan laporan SLHI/SoER, laporan SLHD juga menggunakan metoda S-P-R dengan tujuan agar analisis yang memperlihatkan keterkaitan antara berbagai faktor lingkungan dapat disampaikan lebih komperhensif.

Secara agregasi laporan SLHD kabupaten dan kota merupakan sumber penting bagi penyusunan SLHD provinsi. SLHD Provinsi merupakan sumber penting bagi penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) yang pada waktunya akan dijadikan sebagai salah satu

masukan bagi penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup regional ASEAN, Asia Pasifik, dan lingkungan global (Global Environmental Outlook).



Gambar 1. Piramid Jenjang Pelaporan Status Lingkungan Hidup

A. Laporan SLHD Provinsi

Laporan SLHD provinsi merupakan dokumen yang menggambarkan status dan kecenderungan lingkungan (komponen biofisika, ekonomi, sosial dan demografi) dalam suatu wilayah provinsi (lintas kabupaten/kota).

Dalam melakukan analisisnya, pemerintah provinsi perlu mengangkat isu lintas kabupaten/kota dan atau menggunakan isu prioritas yang perlu ditangani segera yang terjadi di salah satu kabupaten/kota.

Data yang digunakan bersumber dari:

1. Pemantauan kabupaten/kota
2. Pemantauan provinsi
3. Pemantauan sumber lain

B. Laporan SLHD Kabupaten/Kota

Laporan SLHD kota/kabupaten merupakan dokumen yang menggambarkan status dan kecenderungan lingkungan (komponen biofisika, ekonomi, sosial dan demografi) dalam suatu wilayah kota/kabupaten.

C. Jenis Laporan

Laporan SLHD Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari dua buah buku yaitu :

1. Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah

Merupakan analisis S-P-R berdasarkan data dalam buku basis data lingkungan hidup daerah dan data lain yang dianggap perlu untuk menunjang analisis yang komprehensif, serta analisis terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi.

2. Buku Kumpulan Data Lingkungan Hidup Daerah
   Merupakan data media lingkungan (air, udara, lahan dan hutan, keanekaragaman hayati, pesisir dan laut).

Langkah pertama dalam menyusun laporan SLHD adalah menentukan ***isu lingkungan hidup utama.*** Isu lingkungan hidup utama adalah masalah lingkungan yang perlu ditangani segera.

Isu lingkungan hidup utama dapat berbeda dan spesifik di tiap daerah. Daerah diharapkan dapat mengidentifikasikan isu-isu lingkungan hidup lokal potensial di wilayahnya yang membutuhkan perhatian lebih besar dan prioritas untuk ditangani oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.

2. RUANG LINGKUP PENYUSUNAN SLHD

A. Data utama

Data Utama yang digunakan adalah **data lingkungan hidup,** beserta data pendukung lainnya (seperti data sosial dan ekonomi) untuk memperkuat analisis ;

B. Tahun Data

Data yang digunakan adalah data **Oktober 2006 – Oktober 2007** dan **data tahun-tahun sebelumnya (data series 3 - 5** tahun terakhir) untuk melihat kecenderungan (trend)

3. PROSES PENYUSUNAN SLHD

A. Pembentukan Tim Penyusun

Laporan SLHD merupakan laporan Pemerintah Daerah, oleh karena itu dalam penyusunannya harus melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik dari kalangan pemerintah maupun dari kelompok masyarakat lainnya. Keterlibatan anggota tim penyusun ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.

B. Metodologi Pengumpulan Data SLHD

Pengumpulan Data SLHD dilakukan oleh tim penyusun melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pengadaan Data : dengan cara mengumpulkan data primer dan atau mengumpulkan data sekunder di lapangan ataupun mengumpulkan dari berbagai stakeholder
2. Pemilahan data : data yang diperoleh dipilah sesuai dengan media lingkungan
3. Verifikasi data : terhadap data yang telah dipilah dan ditetapkan perlu dilakukan verifikasi kembali sebelum dimasukkan ke dalam format yang telah ditentukan
4. Pengkodean : data yang akan dimasukkan dalam tabel diberi kode sesuai dengan format yang ditentukan

C. Metodologi Penyusunan Laporan SLHD

Laporan SLHD disusun oleh tim penyusun melalui tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan Isu Lingkungan Hidup Utama dalam satu tahun berjalan berdasarkan kriteria dan identifikasi permasalahan sehingga diperoleh prioritas Isu LH untuk Pelaporan SLHD. (Lampiran B)
2. Isu terpilih dianalisis dengan menggunakan metode S-P-R (dituangkan dalam bab II)
3. Menyampaikan kondisi media lingkungan (air, udara, lahan dan hutan, keanekaragaman hayati, pesisir dan laut) berdasarkan pengumpulan data SLHD dan dianalisis dengan menggunakan metode S-P-R

4. Menyampaikan rekomendasi sesuai dengan permasalahan dan upaya penyelesaian yang sedang dilakukan dan atau yang direncanakan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kondisi lingkungan di daerahnya.
5. Melakukan evaluasi terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam SLHD tahun sebelumnya

4. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

A. Laporan SLHD

Outline LAPORAN
Status Lingkungan Hidup Daerah 2007

		Jml. halaman maksimum
Kata Pengantar		2 hal
Daftar Isi		5 hal
Daftar Tabel		5 hal
Daftar Gambar		5 hal
Abstrak	Menampilkan ringkasan isi laporan	1 hal
Bab I	**PENDAHULUAN** • Tujuan penulisan laporan, • Visi dan Misi provinsi/kabupaten/kota • Gambaran Umum ⇨ Kondisi geografis, demografis, geologi, tata ruang, kependudukan, dan kesehatan masyarakat. ⇨ Kebijakan pendanaan lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya di daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan	5 hal
Bab II	**ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA** (penjelasan isu lingkungan hidup utama dikaitkan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik dan kemasyarakatan dengan menggunakan analisis S-P-R)	
Bab III	**AIR** (membahas kondisi, penyebab, dampak, dan respon permasalahan pada media air)	
Bab IV	**UDARA** (membahas tentang kondisi, penyebab, dampak, dan respon permasalahan pada media udara)	Total Bab II-VII = 155 hal
Bab V	**LAHAN DAN HUTAN** (membahas tentang kondisi, penyebab, dampak, dan respon permasalahan pada media lahan dan hutan)	
Bab VI	**KEANEKARAGAMAN HAYATI** (membahas tentang kondisi, penyebab, dampak, dan respon permasalahan pada media keanekaragaman hayati)	
Bab VII	**PESISIR DAN LAUT (BILA ADA)** (membahas tentang kondisi, penyebab, dampak, dan respon permasalahan yang terjadi di media pesisir dan laut)	
Bab VIII	**REKOMENDASI/TINDAK LANJUT**	7 hal

	Berisi tindak lanjut dari respon yang sudah dilaksanakan maupun yang direncanakan	
Daftar Pustaka	• Sumber data (dari dinas/badan daerah, sumber lain) • Referensi pustaka	5 hal
LAMPIRAN	Data pelengkap lainnya	10 hal

B. Kumpulan Data SLHD

Outline KUMPULAN DATA
Status Lingkungan Hidup Daerah 2006

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Peta

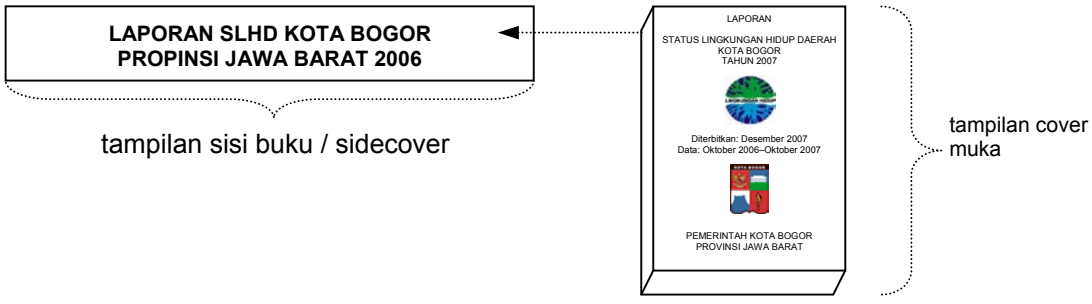
Bab I	**AIR**
Bab II	**UDARA**
Bab III	**LAHAN DAN HUTAN**
Bab IV	**KEANEKARAGAMAN HAYATI**
Bab V	**PESISIR DAN LAUT**

LAMPIRAN

5. FORMAT PELAPORAN

A. Bentuk Fisik Laporan

- Penjilidan
  - Laporan dijilid sampul keras (*hardcover)* atau sampul lunak *(softcover*)
  - Judul laporan dituliskan juga disisi buku/laporan (*sidecover*), seperti **contoh** dibawah ini :



Gambar 2. Contoh Tampilan Cover dan Sidecover

Contoh cover laporan dapat dilihat di Lampiran C.

- Pengaturan halaman
  - Ukuran kertas A4, HVS 80 gram.
  - Spasi 1.5 (satu setengah), jenis huruf (*font*) Arial, ukuran huruf 11 (kecuali untuk penulisan khusus seperti tabel dan gambar).
  - Margin kiri 4 cm; kanan 2,5 cm; atas 2,5 cm; dan bawah 2,5 cm
  - Mencantumkan nomor halaman (*page number*) di sisi kanan bawah sesuai bab (mis: I-1).
  - Maksimum jumlah halaman keseluruhan laporan SLHD adalah 200 halaman (termasuk lampiran)

B. Penyampaian Tabel

Tabel data dibuat dengan mencantumkan:

1. Nomor urut tabel
2. Judul tabel (dilengkapi tahun data)
3. Satuan data
4. Kelengkapan data yang disajikan dalam tabel (bila tidak ada data harap diberi penjelasan/keterangan)
5. Sumber data (dilengkapi tahun)
6. Keterangan data (jika ada)

Apabila dalam analisis menggunakan tabel referensi (tabel yang sudah tercantum di bab lain), harus disebutkan judul bab dan nomor urut tabel tersebut, dan harus dalam satu laporan (tidak dalam laporan lain). Tabel Basis Data dibuat dalam format MS Excel, contoh tabel dan jenis-jenisnya ada pada Lampiran D.

C. Penyampaian Gambar

Gambar (ilustrasi, photo dan peta) dicantumkan sesuai dengan tema dan ada relevansinya dengan isi dengan mencantumkan:

1. Nomor urut gambar
2. Judul gambar (dilengkapi tahun data)
3. Sumber gambar (dilengkapi tahun)

Khusus peta harus disertakan skala (jika tidak ada skala harus ditulis “tidak ada skala”), legenda dan koordinat (jika ada), contoh gambar ada pada Lampiran E.

D. Penyampaian Daftar Pustaka

Mengacu pada sistematika penulisan baku *(Nama Pengarang, Judul, Nama Kota/Negara, Nama Penerbit, Tahun)*

Contoh:

KLH, *Buku Pedoman Umum Penyusunan Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (NKLD) Kabupaten/Kota*, Jakarta, KLH, 2000.

6. WAKTU PELAKSANAAN PENYUSUNAN

A. Pengumpulan dan Penyerahan Kumpulan Data

Daerah	Waktu Pengumpulan Data	Waktu Penyerahan Data (ke Provinsi)
Provinsi	Okt 2006 – Okt 2007	----------
Kabupaten	Okt 2006 – Okt 2007	Selambatnya **16 November 2007**
Kota	Okt 2006 – Okt 2007	Selambatnya **16 November 2007**

B. Penyusunan dan Publikasi Laporan

Daerah	Waktu Penyusunan Laporan	Waktu Penyerahan Laporan/Publikasi (ke KNLH dan Pusreg)
Provinsi	Okt 2007 – Des 2007	Selambatnya **28 Desember 2007**
Kabupaten	Okt 2007 – Des 2007	Selambatnya **28 Desember 2007**
Kota	Okt 2007 – Des 2007	Selambatnya **28 Desember 2007**

7. PENYERAHAN LAPORAN

A. Kelengkapan Penyerahan Laporan

- Laporan dibuat sebanyak dua (2) set, masing-masing terdiri atas satu (1) buku Laporan SLHD dan satu (1) buku Kumpulan Data Lingkungan Hidup Daerah
  - 1 set diserahkan ke KNLH Jakarta
  - 1 set diserahkan ke PPLH Regional masing-masing

- Menyertakan satu (1) set *softcopy* (dalam *Compact Disk*) laporan tersebut yang terdiri dari satu (1) buah *CD* Laporan SLHD dan satu (1) buah *CD* Kumpulan Data Lingkungan Hidup Daerah. Format Laporan SLHD dalam MS Word dan untuk Kumpulan Data SLHD dalam MS Excel.

B. Alamat Penyerahan Laporan

Laporan SLHD diserahkan kepada :

1. **Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup**
   u.p Asisten Deputi Urusan Data dan Informasi Lingkungan
   Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Pengembangan Kapasitas
   (Asdep 1-VII)
   Gedung B Lantai 6
   Jl. D.I.Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas
   Jakarta 13410
   Telp/fax 021-858 0081

2. **Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa**
   Jl. Ringroad Utara Blok A No. 3 dan 12,
   Mancasan Condong Catur Depok Timur
   Sleman - D.I. Yogyakarta Telp / Fax. 0274-486670

3. **Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera**
   Jl. H.R. Soebrantas KM. 10.5, Panam
   Pekanbaru, Riau Telp / Fax. 0761-62962

4. **Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Kalimantan**
   Jl. Jend. Sudirman No.19A
   Balikpapan – Kalimantan Timur Telp / Fax. 0542-738375

5. **Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Bali dan Nusa Tenggara**
   Jl. Ir. Juanda No.2, Niti Mandala Renon
   Denpasar, Bali Telp. 0361-228237 / Fax. 0361-243448

6. **Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku, Papua**
   Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 17
   Makassar, Sulawesi Selatan Telp. 0411-555701 / Fax. 0411-555703

DAFTAR PUSTAKA

Asdep Urusan Data dan Informasi, *Pedoman Umum Penyusunan Laporan SLHD Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2006*, Jakarta, KNLH, 2005

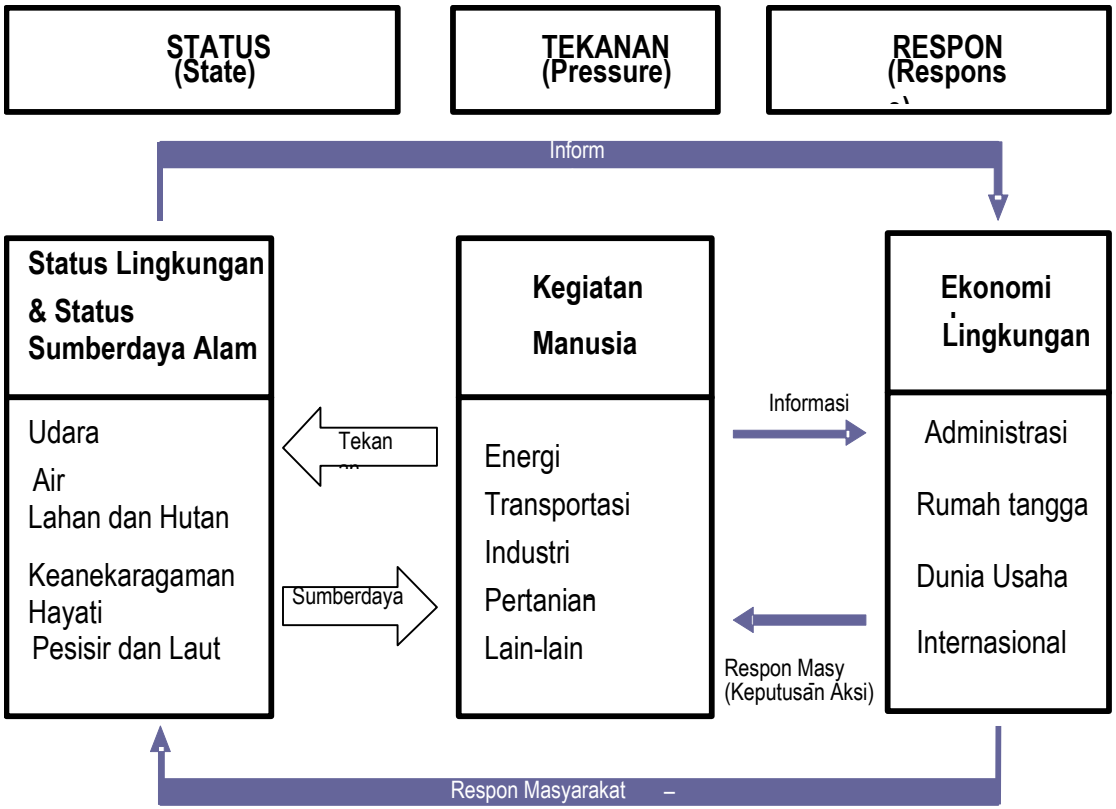
Asdep Urusan Data dan Informasi, *Pedoman Basis Data dan Pelaporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2006*, Jakarta, KNLH, 2005

KLH, *Buku Pedoman Umum Penyusunan Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (NKLD) Kabupaten/Kota*, Jakarta, KLH, 2000

OECD, *A Framework for the State of the Environment Reporting for Asia and Pasific*, Nairobi, Kenya, UNEP Environment Assessment Programme for Asia and Pasific (UNEP/EAP-AP), 1993.

LAMPIRAN - A

MODEL STATE – PRESSURE – RESPONSE (S–P–R)



Harus menyajikan jawaban tentang pertanyaan mendasar berikut :

1. *Apa yang terjadi? Dimana terjadinya?*

   (kondisi lingkungan hidup dan kecenderungannya)

2. *Mengapa terjadi? Bagaimana terjadi?*

   (penyebab perubahan pada manusia dan alam)

3. *Mengapa perubahan ini sangat penting?*

   (implikasi terhadap biofisika dan sosial ekonomi)

4. *Penanggulangan apa yang kita lakukan?*

   (tindakan masyarakat untuk melindungi lingkungan hidup)

5. *Apakah penanggulangan yang dilakukan sudah cukup?*

   (sejauh mana upaya tersebut dapat merestorasi atau memulihkan kondisi lingkungan hidup)

LAMPIRAN - B

KRITERIA ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA

Isu Lingkungan Hidup Utama didasarkan pada semua atau sebagian dari kriteria berikut:

1. bersifat **LINTAS MEDIA LINGKUNGAN**
2. mempunyai **DAMPAK** terhadap **LINGKUNGAN** (kerusakan, pencemaran dan perubahan status)
3. mempunyai **DAMPAK** terhadap **KESEHATAN** dan **KESELAMATAN MANUSIA**
4. mempunyai **DAMPAK** terhadap **PEREKONOMIAN**
5. ada **INDIKASI** menimbulkan **MASALAH BESAR** di masa depan (tahun depan)
6. mempunyai **SKALA** dan **INTENSITAS TINGGI** serta **LUAS**
7. merupakan **BERITA** yang mempunyai tingkatan **DURASI TINGGI** dalam pemberitaan media
8. menimbulkan **REAKSI MASYARAKAT** (dalam negeri atau luar negeri)
9. dampaknya **BERPENGARUH** pada **DAERAH LAIN /NEGARA LAIN/ DUNIA INTERNASIONAL**
10. tersedianya **DATA** secara kuantitas tentang kejadian tersebut

LAMPIRAN – C

CONTOH COVER

Contoh Cover Laporan SLHD Kabupaten dan Kota

LAPORAN

STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA BOGOR
TAHUN 2007

Diterbitkan : Desember 2007

Data : Oktober 2006 – Oktober 2007

PEMERINTAH KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

Halaman dalam cover

Kantor Lingkungan Hidup
Kota Bogor

Alamat : Jl. Paledang no. 43, Bogor 16121
Telp : (0251) 321 577
Fax : (0251) 321 577
E-mail : lingk_hidup_kebersihan@kotabogor.go.id
Web : www.kotabogor.go.id

Contoh Cover Kumpulan Data SLHD Kabupaten dan Kota

KUMPULAN DATA

STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA BOGOR
TAHUN 2007

Diterbitkan : Desember 2007

Data : Oktober 2006 – Oktober 2007

PEMERINTAH KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

Halaman dalam cover

Kantor Lingkungan Hidup
Kota Bogor

Alamat : Jl. Paledang no. 43, Bogor 16121
Telp : (0251) 321 577
Fax : (0251) 321 577
E-mail : lingk_hidup_kebersihan@kotabogor.go.id
Web : www.kotabogor.go.id

Contoh Cover Laporan SLHD Provinsi

LAPORAN

STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2007

Diterbitkan : Desember 2007

Data : Oktober 2006 – Oktober 2007

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Halaman dalam cover

Kantor BPLHD
Provinsi DKI Jakarta

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav C 22,
Gedung Nyi Ageng Serang, JakartaSelatan
Telp : (021) 5228435
Fax : (021) 5228435
E-mail : bid_inf_bplhd@jakarta.go.id
Web : http://bplhd.jakarta.go.id

Contoh Cover Kumpulan Data SLHD Provinsi

KUMPULAN DATA

STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2007

Diterbitkan : Desember 2007

Data : Oktober 2006 – Oktober 2007

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Halaman dalam cover

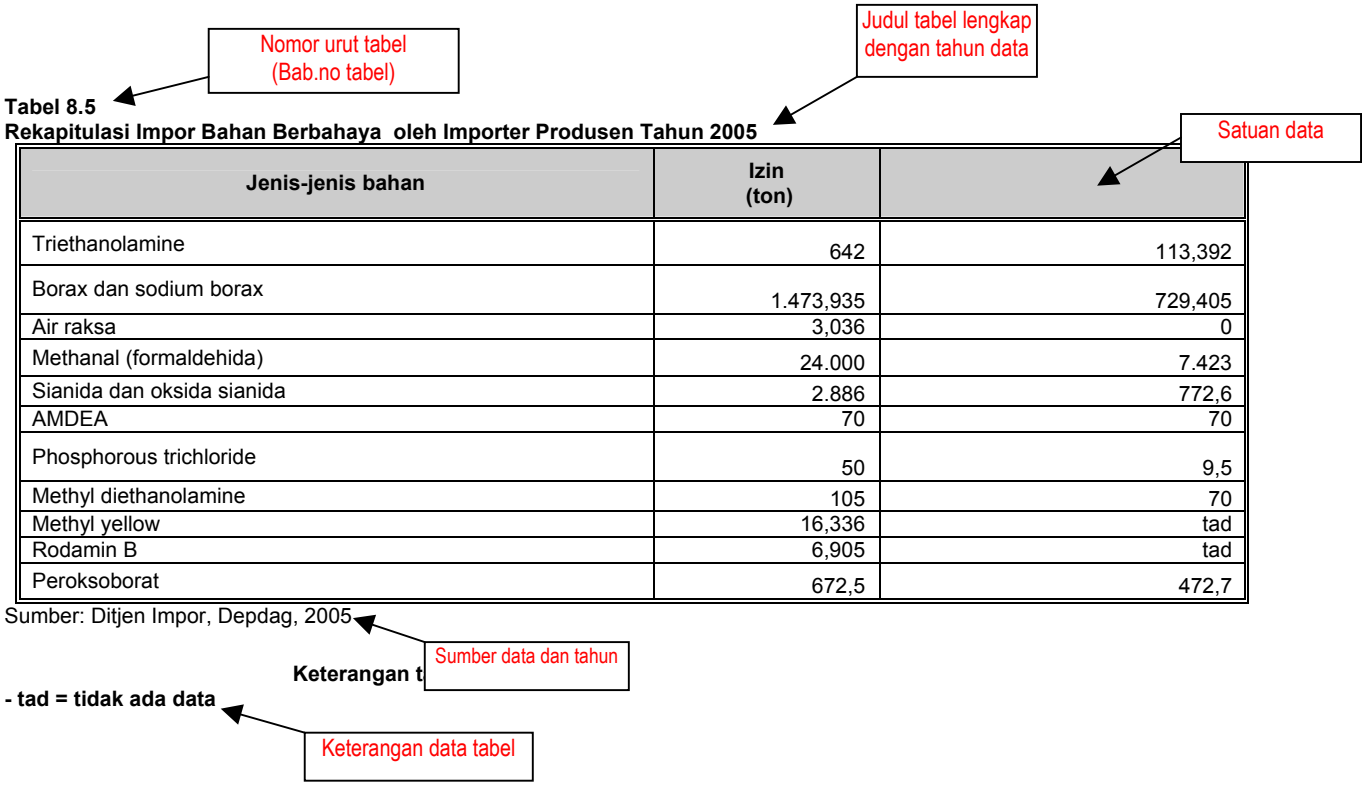
Kantor BPLHD
Provinsi DKI Jakarta

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav C 22,
Gedung Nyi Ageng Serang, JakartaSelatan
Telp : (021) 5228435
Fax : (021) 5228435
E-mail : bid_inf_bplhd@jakarta.go.id
Web : http://bplhd.jakarta.go.id

LAMPIRAN – D

CONTOH TABEL

Tabel digunakan untuk data dalam jumlah besar, dimana jika menggunakan grafik tunggal akan sangat rumit.



Tabel 8.5
Rekapitulasi Impor Bahan Berbahaya oleh Importer Produsen Tahun 2005

Jenis-jenis bahan	Izin (ton)	
Triethanolamine	642	113,392
Borax dan sodium borax	1.473,935	729,405
Air raksa	3,036	0
Methanal (formaldehida)	24.000	7.423
Sianida dan oksida sianida	2.886	772,6
AMDEA	70	70
Phosphorous trichloride	50	9,5
Methyl diethanolamine	105	70
Methyl yellow	16,336	tad
Rodamin B	6,905	tad
Peroksoborat	672,5	472,7

Sumber: Ditjen Impor, Depdag, 2005

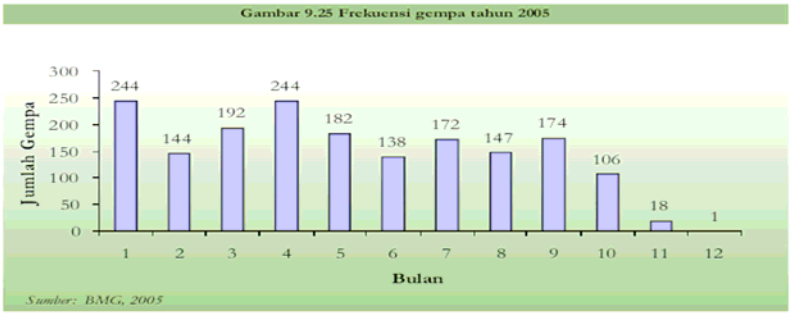
Keterangan t

- tad = tidak ada data

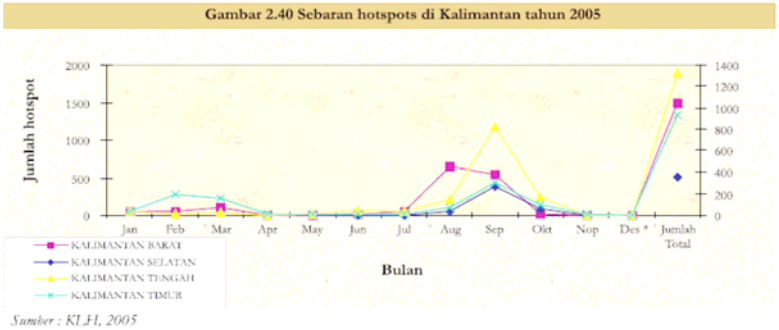
LAMPIRAN – E CONTOH GAMBAR

Grafik

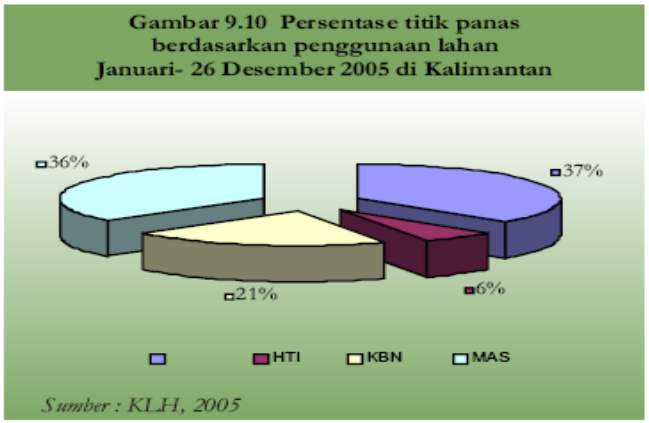
1. Grafik batang untuk data yang dikelompokan atau data yang berlainan (misal kota, kecamatan, bioma, tahun, bulan)



2. Grafik garis adalah untuk data numerik (misal kuantitas, temperatur)

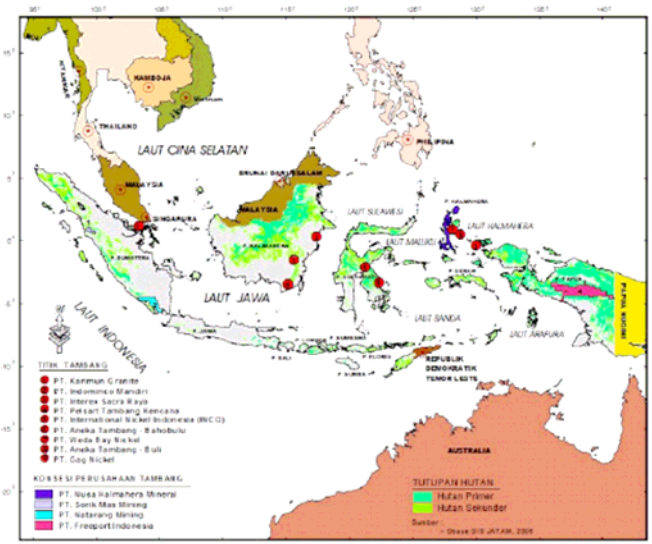


3. Grafik pie adalah untuk perbandingan atau persentasi (misal % tiap spesies dalam total penangkapan, % total anggaran yang digunakan oleh tiap propinsi, perbandingan penggunaan air untuk tiap sektor ekonomi).



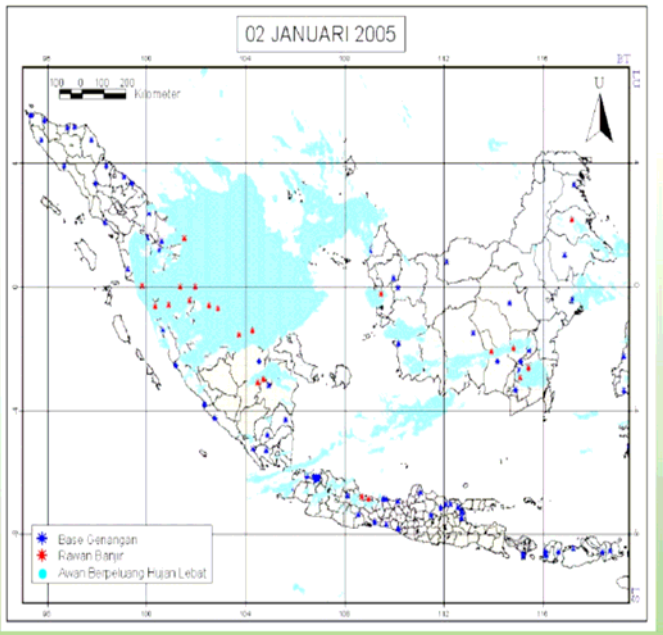
Peta

Gambar 9.11.
Perusahaan yang mendapatkan izin menambang di hutan lindung



Sumber : Dbase GIS Jatam, 2005

Gambar 9.16 Deteksi dini bahaya banjir pada tanggal 2 Januari 2005



Sumber : Lapan, 2005